

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masalah perkreditan yang terjadi di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah khususnya masalah kredit macet mempengaruhi tingkat kesehatan dari Bank tersebut. Bila masalah kredit macet tidak dapat diatasi dengan baik oleh pihak manajemen, akan membuat Bank semakin sulit untuk meningkatkan kinerjanya dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah semakin menurun, oleh karena itu diperlukan suatu solusi yang baik untuk membantu pihak manajemen Bank dalam mengatasi permasalahan kredit macet. Simpulan yang dapat diambil yakni:

1. Kasus-kasus kredit macet yang terjadi selama ini di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagian besar disebabkan oleh faktor internal Bank itu sendiri, hal ini terlihat dari keterlibatan pejabat Bank yang terkait dengan pelayanan kredit pada kasus-kasus kredit macet. Kurangnya pemahaman dan kedisiplinan pejabat Bank khususnya pejabat yang melayani fasilitas kredit terhadap aturan perkreditan mengakibatkan proses pemberian kredit kepada debitur tidak berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga kasus kredit macet sering terjadi dan penyelesaiannya menjadi tidak jelas.
2. Untuk meminimalkan terjadinya kasus kredit macet, diperlukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap debitur yang menggunakan fasilitas kredit, namun PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah tidak memiliki program/jadwal khusus untuk melakukan kunjungan kepada nasabah, kunjungan tersebut baru akan dilakukan bila ada perintah dari pejabat kredit, sehingga

indikator atau pertanda akan macetnya suatu kredit lambat diketahui oleh pihak Bank. Mengatasi kredit macet akan membebani pihak Bank, akan lebih baik lagi jika kredit tersebut dapat dicegah atau diminimalkan dampaknya dengan cara secepatnya diatasi sebelum permasalahan kredit macet tersebut berkembang.

3. Penagihan dan penyelesaian kredit macet diperlukan untuk mengurangi kerugian dari pihak Bank, pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah proses penagihan dan penyelesaian kredit belum berjalan dengan baik, banyak kredit yang sudah jatuh tempo lebih dari dua tahun belum ditangani dan agunan belum dikuasai sepenuhnya oleh pihak Bank dikarenakan belum dilakukan upaya hukum untuk menguasai aset tersebut, hal ini menunjukkan ketidakmampuan pejabat Bank yang terkait dengan penagihan dan penyelesaian kredit dalam menjalankan tugasnya. Bila kredit sudah jatuh tempo dan tidak ada penyelesaian yang baik dengan debitur, maka pihak Bank adalah pihak yang sangat dirugikan, sebab dana milik Bank yang digunakan untuk membiayai fasilitas kredit tersebut tidak bisa diselamatkan atau dikembalikan lagi. Pada aset yang digunakan sebagai agunan oleh debitur, bila tidak dilakukan proses hukum untuk menguasainya maka ada kemungkinan aset tersebut akan hilang atau dikuasai oleh pihak lain.
4. Restrukturisasi kredit melibatkan banyak pejabat Bank khususnya pemimpin-pemimpin utama dilingkungan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, namun berdasarkan kasus restrukturisasi kredit yang terjadi, pejabat-pejabat Bank tersebut tidak memahami betul bagaimana prosedur yang sebenarnya dalam menjalankan restrukturisasi kredit, hal ini menunjukkan bahwa pihak Bank tidak siap secara sumber daya manusia dan sistem restrukturisasi kredit yang dijalankan belum sempurna.

5. PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah memang sudah memiliki suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyelesaikan kredit macet, namun pemanfaatannya kurang optimal, hal tersebut disebabkan tidak adanya strategi yang baku dalam penggunaan SOP tersebut.

7.2. Saran

Dari simpulan yang diambil, maka saran yang ditujukan kepada manajemen PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ialah:

1. Untuk bisa disiplin dalam menerapkan aturan perkreditan, pejabat Bank yang terkait dengan pelayanan kredit perlu memahami dan mengetahui seluk beluk peraturan perkreditan yang berlaku, sehingga terhindar dari pelanggaran selama melakukan proses pemberian kredit kepada nasabah. Selama ini manajemen PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dalam menerapkan aturan perkreditan lebih menitik beratkan *punishment* kepada pejabat pelayanan kredit yang melanggar aturan perkreditan, namun mengabaikan *reward* bagi pejabat pelayanan kredit yang berhasil mengatasi suatu kredit yang bermasalah. Perlu adanya pertimbangan antara *punishment* dan *reward* dalam manajemen kredit PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sehingga para pejabat pelayanan kredit lebih terpacu untuk menerapkan aturan yang benar dalam proses pemberian kredit serta berusaha untuk mengatasi permasalahan kredit macet.
2. Yang menjadi kendala dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kredit di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah adalah tidak adanya jadwal atau program khusus untuk melakukan kunjungan berkala kepada nasabah. *Account Officer* memiliki hubungan yang lebih dekat dengan nasabah bila dibandingkan dengan pejabat Bank yang lain, sehingga *account officer* lebih mengetahui

keadaan nasabah yang sesungguhnya. Berdasarkan data dan laporan yang diberikan *account officer*, maka jadwal atau program khusus untuk melakukan kunjungan berkala kepada nasabah dapat disusun oleh pemimpin seksi pemasaran atau disusun bersama oleh komite kredit, hal ini dilakukan karena pejabat yang tergabung dalam keanggotaan komite kredit memiliki tanggung jawab yang sama besar terhadap kredit yang menjadi binaannya.

3. Ketidakmampuan pejabat Bank dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, menunjukkan kualitas pejabat Bank yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan kriteria yang sesuai dengan fungsi jabatannya. Ada baiknya bila pejabat yang akan ditempatkan pada posisi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, sesuai dengan standar dan kriteria yang diperlukan untuk menjalankan fungsi jabatannya, sehingga menunjang kinerjanya dalam melakukan proses penagihan dan penyelesaian kredit.
4. Ketidaksiapan sumber daya manusia dan sistem restrukturisasi kredit yang terjadi dalam PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah tidak akan pernah bisa dibenahi dan diatasi bila para pemimpin utama Bank tersebut tidak patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bank sentral (Bank Indonesia) mengenai restrukturisasi kredit (SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR Tahun 1998 dan perubahannya No. 2/15/PBI/2000). Diharapkan para pemimpin utama PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah memahami lebih mendalam serta disiplin dalam penerapan aturan tersebut, sehingga dapat merancang suatu sistem yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan proses restrukturisasi kredit yang benar.

5. Petugas atau pejabat Bank yang terkait langsung dengan pelayanan kredit perlu memahami betul apa yang menjadi permasalahan utama suatu kasus kredit macet, sebab berdasarkan permasalahan tersebut suatu strategi penyelesaian kredit di bentuk, untuk mengetahui permasalahan utama suatu kasus kredit macet maka informasi yang dikumpulkan harus benar-benar lengkap dan spesifik serta teruji kebenarannya untuk menghindari informasi yang salah. Setelah semua informasi sudah dianalisis dan sudah dilakukan penilaian maka strategi sudah dapat dibentuk untuk mencari tindakan yang sesuai dengan kasus kredit macet tersebut, sebab setiap kasus kredit macet memiliki akar permasalahan yang berbeda-beda sehingga diperlukan suatu tindakan yang akan menjadi solusi yang sesuai dengan kasus kredit macet tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ariyani. Agustus 2006. *Tiga Bulan ini, BI Awasi Khusus Kredit Macet Perbankan*.
(<http://www.temppointeraktif.com>, diakses 8 Agustus 2006)
- Chairudin, H. 2002. *Analisis Posisi Likuiditas*. Medan: Fakultas Ekonomi Sumatera Utara
- Daruri, Deni. Agustus. *Fenomena Kredit Macet*. (<http://www.wartaekonomi.com>, diakses 8 Agustus 2006)
- Fabozzi, Modigliani 1994. *Foundation of Financial Market and Institutions*. New Jersey: Prientice Hall Inc.
- Febriyani, Anita. Desember 2003. Analisis Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa di Indonesia. Jakarta: *Kajian Ekonomi dan Keuangan* Vol. 7 No. 4 hlm. 3-5
- Hidayat, Khomarul. Juni 2003. *Penanganan Kredit Macet Jangan Merusak Citra Perbankan*. (<http://www.sinarharapan.co.id>, diakses 19 Juni 2006)
- Irman. Juli 2006. *Anatomi Kejahatan Perbankan*. Bandung: MQS Publishing & CV. Ayyccs Group
- Mahmoeddin, H. As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: CV. Muliasari
- Martono. September 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Ekonesia
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remadja Rosidakarya.
- Retnadi, Djoko. Maret 2006. Arah Penyaluran Kredit Pasca Pakjan BI 2006. *Jurnal Economic Review* No. 203 hlm. 1-8

- Rose, Peter S. 1988. *Financial Institutions, Understanding and Managing Services*. Texas: Business Publication Inc.
- Sabirin, Syahril. April 1999. *Pemberdayaan Perbankan Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia*. Universitas Yarsi
- Siamat, Dahlan 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia.
- Sinungan, Muchdaryah. 1994. *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syahyunan. 2002. *Analisis Kualitas Aktiva Produktif Sebagai Salah Satu Alat Ukur Kesehatan Bank*. Medan: Fakultas Ekonomi Sumatera Utara
- Syukuri, M. Maret 2006. Uniform Classification dalam Transisi. *Jurnal Economic Review* No. 203 hlm. 5-6
- Winarta, Frans Hendra. Agustus 2006. *Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum*. (<http://www.komisihukum.go.id>, diakses 8 Agustus 2006)
- Yin, Robert K. 2005. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada